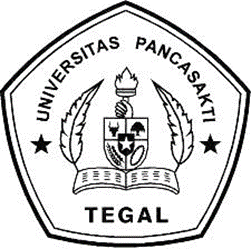
**PERAN POLITIK HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI PUBLIK DI ERA DIGITAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**PANJI NUSWANTORO**

**NPM. 5119500063**

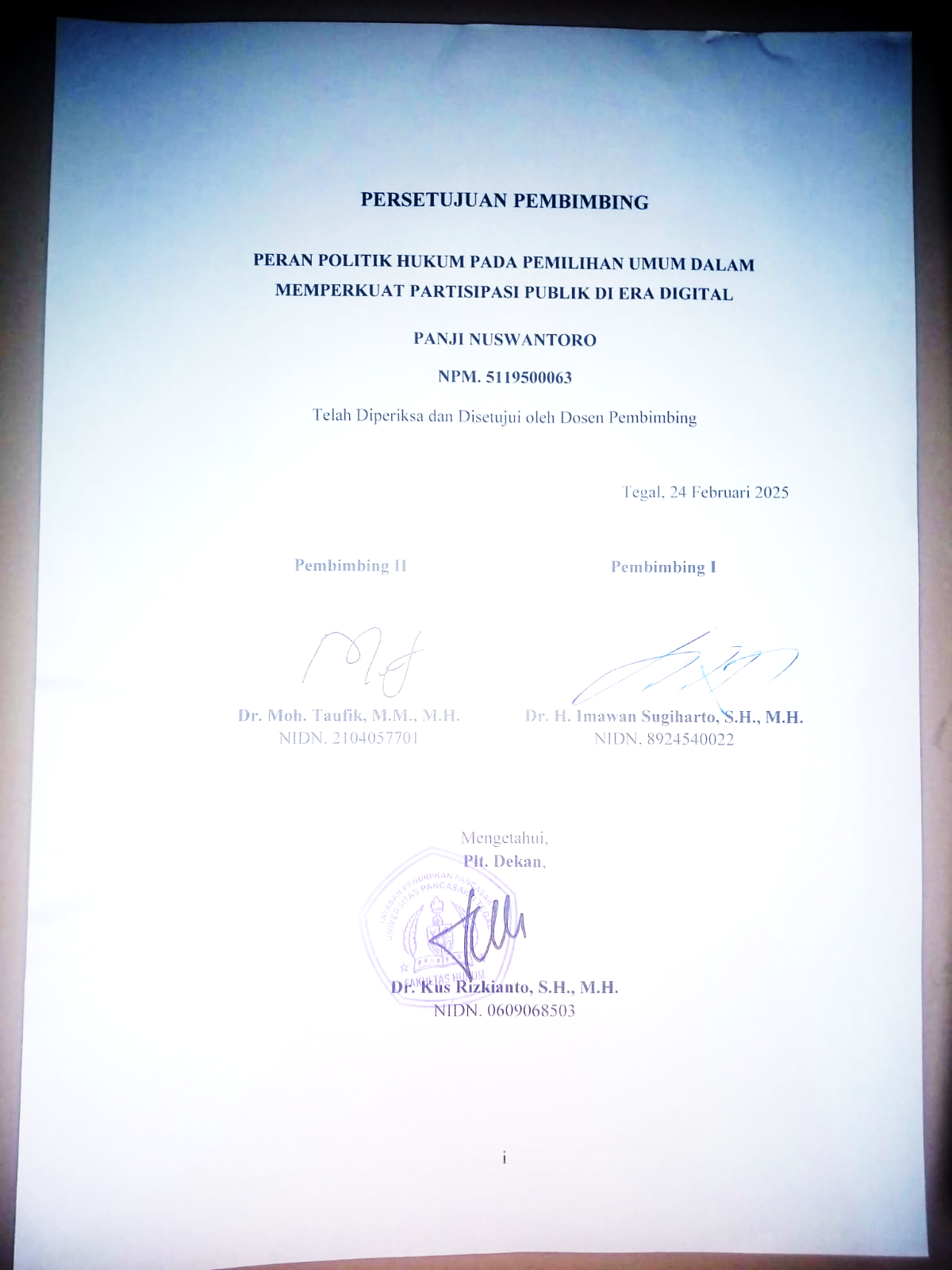
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

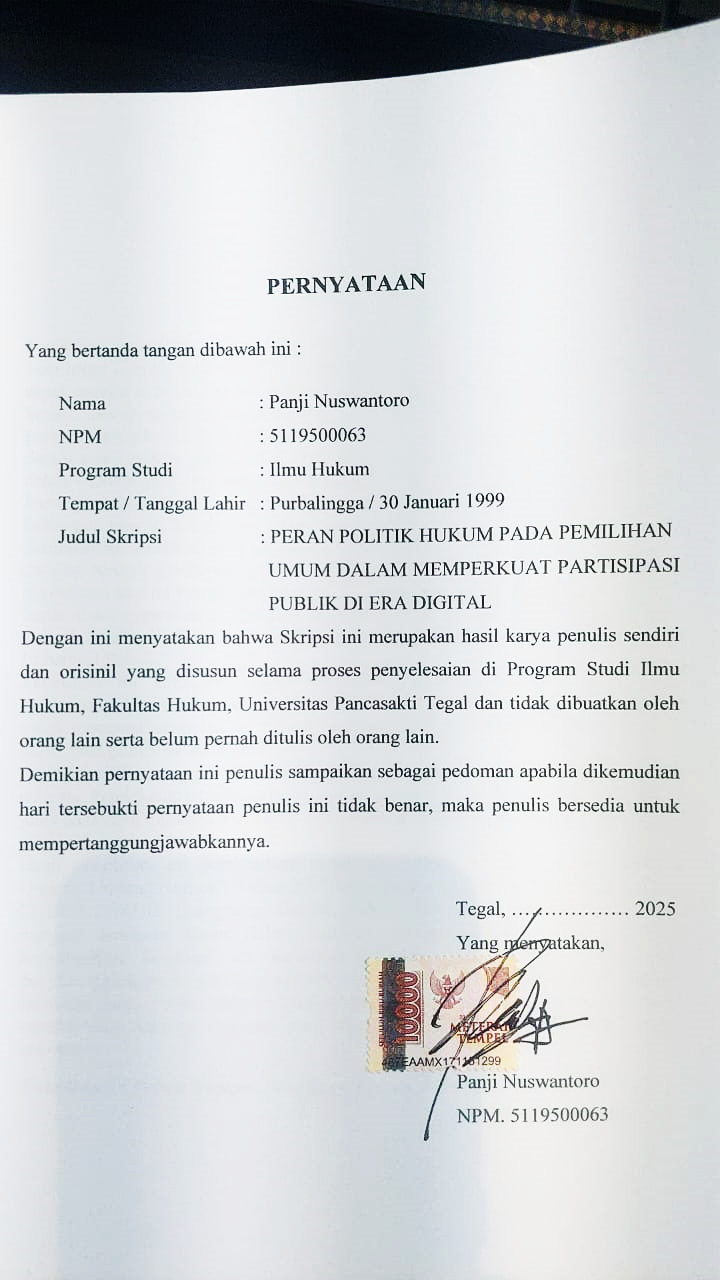
# PERSETUJUAN PEMBIMBING



# PENGESAHAN



# PERNYATAAN



# ABSTRAK

Pemilihan umum diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai seluruh aspek pemilu di Indonesia, termasuk pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah serta menetapkan mekanisme pemilihan, partisipasi politik, dan pengawasan pemilu. Sistem politik merujuk pada struktur, proses, dan interaksi dalam suatu sistem politik yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga politik dalam suatu negara atau masyarakat salah satu dari sistem tersebut adalah mengenai Partisipasi politik mencakup berbagai cara di mana individu dan kelompok-kelompok masyarakat terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, demonstrasi, advokasi atau partisipasi dalam lembaga politik. Jika dihubungkan dengan adanya partisipasi publik terhadap kegiatan pemilihan umum pada era digitalisasi saat ini Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi secara terbuka atas pelaksanaannya seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan untuk menganalisis peran politik hukum pada pemilihan umum dalam memperkuat partisipasi publik di era digital.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum terapan atau yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini mengunakan metode penelitian Normatif dengan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dirancang untuk mengedepankan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), yang menjadi landasan utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Regulasi ini mengatur seluruh aspek pemilu, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga mekanisme teknis penyelenggaraan. Politik hukum memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi publik di era digital dengan memberikan landasan normatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

***Kata Kunci : Politik Hukum, Pemilihan Umum, Partisipasi Publik***

# ***ABSTRACT***

*General elections are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which in the regulation explains all aspects of elections in Indonesia, including presidential elections, legislative elections, and regional head elections as well as stipulating election mechanisms, political participation, and election supervision. Political system refers to the structure, process, and interaction in a political system that involves various political actors and institutions in a country or society. If it is related to public participation in general election activities in the current era of digitalization, General Elections or Elections are a democratic party that must be held by democratic countries openly for their implementation as in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.*

*This study aims to analyze the implementation of general elections based on Law Number 7 of 2017 concerning general elections and to analyze the role of political law in general elections in strengthening public participation in the digital era.*

*The type of research used by the author is applied law or empirical juridical research. This research approach uses the Normative research method with the type of data used in this study is a combination of primary data and secondary data.*

*The results of this study show that the implementation of general elections in Indonesia based on Law Number 7 of 2017 has been designed to prioritize the principle of LUBER JURDIL (Direct, Public, Free, Secret, Honest, and Fair), which is the main foundation in creating democratic and integrity elections. This regulation regulates all aspects of elections, from organizers, participants, to technical mechanisms. Legal politics has an important role in strengthening public participation in the digital era by providing a normative foundation that is adaptive to the development of information technology*.

***Keywords: Legal Politics, General Elections, Public Participation***

# PERSEMBAHAN

بِ**سْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

*~ be respect, be royalty~*

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta, Bapak Bukhori dan teristimewa Ibu Khamiti yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu abang yang selalu menjadi motivasi, penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini.

**آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ**

# MOTTO

*"Mungkin kita sampai, Mungkin saja tidak Tugas kita hanyalah berjalan"*

*"Bersandarlah di pundakkubila kau lelahmenangislah di pelukkukalau kau mau, Hidup memang begitu indah,Hanya itu yang kita punya"*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telahmelimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERAN POLITIK HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI PUBLIK DI ERA DIGITAL”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Kepada Bapak Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing IIyang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan*.*
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
8. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, ……………….

Penulis,

Panji Nuswantoro

NPM. 5119500063

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc189194317)

[PENGESAHAN ii](#_Toc189194318)

[PERNYATAAN iii](#_Toc189194319)

[ABSTRAK iv](#_Toc189194320)

[*ABSTRACT* v](#_Toc189194321)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc189194322)

[MOTTO vii](#_Toc189194323)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc189194324)

[DAFTAR ISI x](#_Toc189194325)

[BAB I 1](#_Toc189194326)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc189194327)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc189194328)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc189194329)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc189194330)

[D. Urgensi Penelitian 7](#_Toc189194331)

[E. Tinjauan Pustaka 8](#_Toc189194332)

[F. Metode Penelitian 11](#_Toc189194333)

[G. Sistematika Penulisan 16](#_Toc189194334)

[BAB II 18](#_Toc189194335)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 18](#_Toc189194336)

[A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum 18](#_Toc189194337)

[1. Pengertian Politik Hukum 18](#_Toc189194338)

[2. Ruang Lingkup Politik Hukum 21](#_Toc189194339)

[B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum 24](#_Toc189194340)

[1. Pengertian Pemilihan Umum 24](#_Toc189194341)

[2. Ruang Lingkup Pemilihan Umum 27](#_Toc189194342)

[3. Penyelenggara Pemilu 30](#_Toc189194343)

[C. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Publik 32](#_Toc189194344)

[1. Pengertian Partisipasi Publik 32](#_Toc189194345)

[2. Ruang Lingkup Partisipasi Publik 36](#_Toc189194346)

[D. Tinjauan Umum Tentang Era Digital 39](#_Toc189194347)

[1. Pengertian Era Digital 39](#_Toc189194348)

[2. Ruang Lingkup Era Digital 41](#_Toc189194349)

[BAB III 46](#_Toc189194350)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46](#_Toc189194351)

[A. Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 46](#_Toc189194352)

[1. Penerapan Asas dan Prinsip Pemilihan Umum 48](#_Toc189194353)

[2. Peserta Pemilihan Umum 53](#_Toc189194354)

[B. Peran Politik Hukum Pada Pemilihan Umum Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Di Era Digital 59](#_Toc189194355)

[BAB IV 69](#_Toc189194356)

[PENUTUP 69](#_Toc189194357)

[A. Kesimpulan 69](#_Toc189194358)

[B. Saran 70](#_Toc189194359)

[DAFTAR PUSTAKA 72](#_Toc189194360)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80](#_Toc189194361)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Secara ilmiah, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yang termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian. Kegiatan politik bukanlah kegiatan individu semata, melainkan aktivitas yang memungkinkan banyak individu berinteraksi di dalamnya.[[1]](#footnote-1) Salah satu cabang dari kegiatan politik adalah Pemilihan Umum yang biasa disebut Pemilu merupakan bagian dari proses perwujudan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Proses penyelenggaraan pemilu ini diperlukan Partisipasi masyarakat, mengingat masyarakat mempunyai hak pilih yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hak pilih diberikan kepada setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan

adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Kebijakan pemerintah mengenai partisipasi masyarakat terhadap pemilu juga tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilihan umum diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai seluruh aspek pemilu di Indonesia, termasuk pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah serta menetapkan mekanisme pemilihan, partisipasi politik, dan pengawasan pemilu. Jika dilihat secara keseluruhan kaitannya dengan pemilu dan juga Politik merupakan cara seseorang untuk dapat mendapatkan sesuatu yang diingkannya serta mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, pembuatan keputusan, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Dalam konteks pemilihan umum politik merupakan sebuah cara dalam memenangkan hati masyarakat untuk mememilih mereka yang berkepentingan pada pemerintahan. Untuk praktiknya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti kampanye, menyebarkan brosur, memasang baliho dan lain sebagainya yang memiliki peluang untuk dapat memenangkan mereka yang berkepentingan dipemerintahan.

Sistem politik merujuk pada struktur, proses, dan interaksi dalam suatu sistem politik yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga politik dalam suatu negara atau masyarakat salah satu dari sistem tersebut adalah mengenai Partisipasi politik mencakup berbagai cara di mana individu dan kelompok-kelompok masyarakat terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, demonstrasi, advokasi atau partisipasi dalam lembaga politik.[[2]](#footnote-2) Proses dari sistem politik itu sendiri dapat dilakukan apabila partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum ini berjalan secara massif dan tekordinasi dengan baik terlebih lagi pada era digitalisasi ini yang notabenenya lebih mudah dalam memperoleh informasi. Dalam Pasal 448 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal ini menekankan peran KPU dalam melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Perkembangan era dgitalisasi dan Teknologi Informasi dalam media digital dimana terdapat hal yang bentuk hasil dari teknologi tersebut yang bernama internet, yang merupakan database dari segala infomasi yang ada, jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini perkembangan era tersebut akan merubah segala pola partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum hal ini juga berdampak pada politik hukum yang akan berjalan nantinya.

Politik hukum mempelajari dinamika kompleks yang berkembang antara politik dan hukum dalam suatu negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar politik hukum Indonesia, sekaligus produk dari politik hukum. Pancasila juga menjadi landasan politik hukum Indonesia, khususnya asas keadilan sosial yang menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dalam esensinya, politik hukum memandang keterkaitan erat antara dua unsur utama ini dan bagaimana mereka saling memengaruhi. Sebagai salah satu subdisiplin ilmu hukum, politik hukum membahas pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kebijakan politik dan proses pembuatan keputusan pemerintah berkontribusi pada pembentukan, pelaksanaan, dan perkembangan sistem hukum suatu negara.[[3]](#footnote-3) Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di Majalah Hoekoem dalam artikel yang berjudul "Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia". Selanjutnya politik hukum menjadi cabang pengetahuan sekaligus diajarkan sebagai suatu mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Moh. Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Politik Hukum Indonesia".[[4]](#footnote-4)

Definisi atau pengertian tentang politik hukum seperti yang diuraikan oleh Moh. Mahfud MD pada intinya menyatakan bahwa politik hukum tidak akan lepas dari cita-cita nasional Negara Indonesia yang diwujudkan melalui kebijakan hukum. Moh. Mahfud MD selain mengemukakan terkait dengan politik hukum, juga membuat kriteria terkait dengan politik hukum. Ada tiga kriteria tentang politik hukum yaitu: [[5]](#footnote-5)

1. Kebijakan negara dalam memberlakukan hukum untuk mewujudkan cita-cita negara
2. Latar belakang dibuatnya kebijakan hukum yang diberlakukan
3. Penegakan hukum dari kebijakan hukum yang diberlakukan.

Jika dihubungkan dengan adanya partisipasi publik terhadap kegiatan pemilihan umum pada era digitalisasi saat ini Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi secara terbuka atas pelaksanaannya seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 4 menyebutkan :

“*Menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik, yang juga mencakup informasi tentang penyelenggaraan pemilu dan penggunaan teknologi digital dalam proses pemilu*.”

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan :

“*Mewajibkan badan publik, termasuk penyelenggara pemilu, untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, yang relevan dengan transparansi dan penggunaan digital dalam proses pemilu*.”

2 (dua) pasal diatas tentang keterbukaan informasi publik menjadi suatu sorotan sekaligus suatu kewajiban badan publik melakukan transparansi dan penggunaan digital dalam proses pemilu untuk meningkatkan partisipasi publik dalam hal pemilu. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik dalam pemilu, website KPU, Pemda, dan Polri dapat dioptimalkan dengan menyediakan portal interaktif yang menyajikan informasi pemilu secara transparan, seperti jadwal, daftar calon, tata cara pencoblosan, dan hasil resmi. Website KPU dapat menampilkan dashboard visual, edukasi pemilih melalui video, dan akses informasi multibahasa. Website Pemda dapat membantu masyarakat dengan peta lokasi TPS interaktif, pengumuman program sosialisasi lokal, dan layanan pengaduan. Sementara itu, website Polri dapat memberikan informasi terkait keamanan pemilu, edukasi tentang pelanggaran, serta portal pelaporan online. Integrasi antar-website, promosi di media sosial, keamanan data, dan evaluasi berkala dapat memastikan sistem informasi yang efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “PERAN POLITIK HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI PUBLIK DI ERA DIGITAL”.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dilaksanakan?
2. Bagaimanakah peran politik hukum pada pemilihan umum dalam memperkuat partisipasi publik di era digital?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis peran politik hukum pada pemilihan umum dalam memperkuat partisipasi publik di era digital.

## Urgensi Penelitian

Penelitian ini mempunyai ugensi penelitian yang berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian urgensi dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan informasi serta refrensi pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memahami penerapan dari politik hukum pada pemilihan umum, terutama para praktisi hukum dan juga para pelaku politik yang sedang melakukan ajang kontestansi pemilu.
2. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksaaan, pengertian, subyek, obyek, lingkup, penegakan hukum dengan memahami bagaimana kerangka hukum positif indonesia tersebut mempengaruhi praktik politik hukum didalam pemilu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori politik hukum dan mekanisme dari perkembangan partisipasi publik dalam pemilu di era digitalisasi.
3. Untuk melihat dan memahami bagaimana sistem hukum dan politik di Indonesia dalam mengakomodir masyarakat menyingkapi suatu adanya pemilu pada era digitalisasi sekarang ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji mengenai peran politik hukum pada pemilihan umum dalam memperkuat partisipasi publik di era digital**,** untuk itu dalam penelitian ini akan menguraikan berbagai konsep, teori, dan penelitian sebelumnya yang relevan dari penelitian ini, tentang peran politik hukum pada pemilihan umum dalam memperkuat partisipasi publik di era digital. Berikut adalah penelitian-penelitan terdahulu yang mempunyai persamaan serta perbedaan penelitiannya :

1. Mega Sulistiowati dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021 dengan judul penelitian “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan)”.[[6]](#footnote-6) Penelitian Mega Sulistiowati menjelaskan bahwa : (1) KPU Kota Pekalongan telah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pelaksana pemilu dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal ini berakibat pada membaiknya sistem pemilu di Kota Pekalongan. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah status sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi geografis, lokasi, sarana prasarana, dan afiliasi politik orang tua. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggaran yang terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran untuk kegiatan, tidak sejalannya rencana dan realisasi pada suatu program, serta kendala dalam budaya pada setiap masyarakat.

Berdasarkan penelitian Mega Sulistiowati terdapat suatu persamaan pada penelitian yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Sedangkan perbedaan yang akan penulis bahas adalah bagaimana penerapan politik hukum dalam pemilihan umum untuk memperkuat partisipasi publik di era digitalisasi

1. Kamal dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2022 dengan judul “Implementasi Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017”.[[7]](#footnote-7) Dalam penelitian Kamal menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini Korelasi Politik Hukum terkait Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019 bermula dari Putusan Nomor 14/ PUUXI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan penelitian Arif Darmawan terdapat suatu persamaan pada penelitian yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu terleta pada implementasi politik hukum pada pemilihan umum. Sedangkan perbedaan yang akan penulis bahas adalah bagaimana penerapan dari politik hukum pada pemilihan umum untuk memperkuat partisipasi publik di era digitalisasi.

1. Cut Raina Lidia dalam Skripsi Fisip, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2024 dengan judul “Literasi Politik Di Era Digital Dalam Memahami Isu-Isu Politik Bagi Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Kota Lhokseumawe)”.[[8]](#footnote-8) Dalam penelitian Cut Raina Lidia menguraikan media sosial yang digunakan pemilih pemula dalam mendapatkan pengetahuannya terkait informasi-informasi politik Pilkada 2024 berpengaruh terhadap perilaku pemilih pemula dalam menentukan Pilihannya. Dengan maraknya informası-informasi politik yang ada pada media sosial memudahkan pemilih terutama pemilih pemula dalam mengenal calon yang akan dipilihnya. Meskipun media sosial memberikan peluang besar bagi pemangku kepentingan pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik, platfom ini juga membawa tantangan berupa penyebaran disinformasi atau berita palsu.

Berdasarkan penelitian Cut Raina Lidia terdapat persamaan dalam subjek mengenai partisipasi publik dalam kegiatan pemilu sedangkan dalam perbedaan pembahasan yaitu penerapan politik hukum sebagai titik berat dalam partisipasi publik dalam kegiatan pemilu di era digitalisasi, dengan demikian hal ini yang akan penulis bahas dengan menganalisis politik hukum sebagai landasan dalam meningkatkan paritisipasi publik dalam pemilu di era digitalisasi.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Merupakan penelitian melalui perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menala’ah dan meneliti berbagai literatur-literatur berbentuk buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian didukung dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder, yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Dilihat dari bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum.[[9]](#footnote-9) Jenis penelitian dalam studi kepustakaan ini dimulai dengan pengumpulan data primer yang menjadi dasar penelitian, kemudian diperkuat dengan data sekunder yang mendukung tema penelitian. Berdasarkan bidang kajian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, yang menelaah isu-isu hukum melalui analisis literatur.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).[[10]](#footnote-10) Penelitian normatif metodenya disebut dengan metode doktrinal monologik yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang menghadiahi sebuah perilaku. Tipe kajian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah dan metode doktrinal adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pengembanan teori hukum dan ilmu hukum.[[11]](#footnote-11) Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh melalui penelususran dokumen melalui penelahaan terhadap berbagai macam arsip, buku, literatur, catatan jurnal maupun berbagai laporan yang berkaitan dengan peran politik hukum dalam memperkuat partisipasi publik dalam pemilihan umum di era digitalisasi.

1. Sumber Data

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder. Dengan demikian sumber data yang akan digunakan penulis dalam pengumpulan sumber data peneliti anatra lain :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer berikut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan meruapakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain buku buku yang terkait dalam penelitian ini, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan mengumpulkan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan tertentu, menguji hipotesis, hingga menilai hasil. Baik penelitian kualitatif dan kuantitatif, masing-masing memiliki metode pengumpulan data yang berbeda. Metode ini dapat dipilih sesuai kebutuhan. Peneliti juga bisa menjalankan beberapa metode pengumpulan data sekaligus.[[12]](#footnote-12) Untuk memperoleh data yang lengkap dan komprehensif dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mencakup sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber ini diperoleh melalui pengamatan langsung, laboratorium hukum, jurnal hukum, serta internet. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis melalui investigasi dokumen dan bahan hukum, sehingga relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif kualitatif. "penelitian kualitatif" yang pada intinya adalah menjelajah satu topik tertentu dan menggali "kebenaran" dari sudut pandang responden, bukan sudut pandang peneliti yang didukung oleh analisis statistik lengkap dengan persyaratannya yang ketat.[[13]](#footnote-13) Rancangan penelitian deskriptif pada umumnya menggambarkan secara terperinci ciri-ciri sebuah komunitas atau sebuah objek. Jika yang diteliti tidak banyak atau tidak luas dan penelitian dilakukan dalam waktu singkat saja, umumnya peneliti akan menyebutnya sebagai studi eksploratori skala kecil.[[14]](#footnote-14) Analisis penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, menggunakan data yang telah disusun menjadi kalimat dan dilakukan secara sistematis. berdasarkan konsep hukum, prinsip hukum, norma hukum, dan ketentuan hukum positif. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara mengurutkan data pada suatu pola dan kategori yang diperoleh melalui pendekatan kepustakaan atau melakukan studi dokumen Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan secara kualitatif.

## Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada awal bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan dan jadwal penelitian yang merupakan gambaran awal dari penelitian ini.

Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab penulis berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan Konseptual ini mencakup Tinjauan Umum mengenai pemilihan umum, Tinjauan Umum politik hukum, Tinjauan Umum partisipasi, Tinjauan umum tentang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilihan Umum dilaksanakan. (2) Bagaimanakah peran politik hukum pada pemilihan umum dalam memperkuat partisipasi publik di era digital.

Bab IV Penutup, pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dibahas serta saran kepada pihak-pihak yang berpengaruh pada penelitian ini.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

### Pengertian Politik Hukum

Politik hukum berasal dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek, bentukan dari duakata rechtdan politiek. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement*, *verdict*, *decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority*, *power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain.[[15]](#footnote-15) Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan parateoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadikarena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahlidalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangakat aturantingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.[[16]](#footnote-16) Secara terminologi, Pengertian politik hukum secara terminology dikaji dengan dua model pendekatan. Pertama, politik hukum dipahami dengan pendekatan memberikan masing-

masing pengertian pada kata politik dan hukum (*divergen*), selanjutnyamenggabungkan kedua kata politik dan hukum (*konvergen*). Kedua, pendekatan yang langsung mengartikan politik hukum dalam satu kesatuan sebagai frase dengan pengertian yang utuh. Frase politik hukum bermakna lebih luas dari kebijakan hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum. Sebagai frase, pengertian politik hukum merupakan keseluruhan aktivitas.[[17]](#footnote-17)

Pengertian yang lebih mendalam, politik hukum adalah kajian tentang bagaimana sistem hukum suatu negara diarahkan, dibentuk, dan dipengaruhi oleh keputusan politik. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum diciptakan, diubah, dan dilaksanakan sebagai hasil dari proses politik yang berkembang. Sebagai contoh, ketika sebuah undang-undang disahkan, itu adalah hasil dari pengambilan keputusan politik yang melibatkan pemilihan umum, perdebatan di parlemen, dan tindakan eksekutif untuk menandatangani undang-undang tersebut. Politik hukum juga memungkinkan kita untuk memahami bahwa hukum bukanlah entitas yang eksis secara terpisah dari politik. Sebaliknya, hukum selalu terkait erat dengan dinamika politik yang ada. Sebuah hukum dapat mencerminkan kebijakan politik tertentu, dan hukum ini mungkin berubah seiring dengan perubahan dalam arah kebijakan politik.[[18]](#footnote-18)

Politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijakan Negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukanyang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum baru atau dapat dikatakan dengan pencabutan dan penggantian hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum dan politik hidup berdampingan, tidak terpisah. Bentuk hukum pun juga dipengaruhi oleh politik hukum. Philippe Nonet dan Philip Selznick menyebutkan ada tiga modelhukum yang dipengaruhi olehsuatupolitik hukum dalam suatu negara yaitu hukum represif, hukum responsif dan hukum otonom.[[19]](#footnote-19) Berdasarkan pada pengertian politik hukum tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa politik hukum merupakan sebuah kekuatan dan strategi yang dapat mewarnai atau membentuk suatu hukum dan juga kekuatan yang mengarahkan bagaimana hukum harus ditegakkan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Satu hal yang harus tetap dijunjung tinggi adalah bahwa tujuan akhir dari politik hukum adalah mencapai cita-cita bangsa, oleh sebab itu pembaharuan hukum harus dapat mengakomodasi kehendak dan kepentingan rakyat serta dapat mewujudkan cita-cita yang dikehendaki rakyat.[[20]](#footnote-20)

### Ruang Lingkup Politik Hukum

Urgensi dari pengertian politik hukum merupakan kebijakan den-gan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak me- rumuskan peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian tujuan negara. Pengertian politik hukum yang demikian berpijak pada tiga hakikat utama. pertama, politik hukum harus dilakukan dalam kerangka kebijakan yang rasional dengan memperhatikan konfigurasi sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural, dan pendekatan komparatif. Kedua, politik hukum merupakan upaya melahirkan peraturan perundang- undangan yang memiliki daya guna. Ketiga, politik hukum dilakukan semata-mata dalam rangka pencapaian tuiuan negara.[[21]](#footnote-21)

Konsep politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Konsep lainnya kegiatan berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.[[22]](#footnote-22) Dari berbagai pemahaman tentang politik hukum tersebut dan mengacu terhadap pendapat Mahfud MD yang mengatakan political law atau politik hukum diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan yakni:

1. Politik hukum merupakan pedoman atau *legal policy* dari lembaga Negara dalam perancangan suatu hukum.
2. Politik hukum merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* agar tercapainya suatu tujuan Negara.
3. Politik hukum jika dihubungkan pada pencapaian tujuan Negara, maka politik hukum itu sekurangnya merangkumi hal-hal sebagai berikut.
4. Tujuan Negara yang diidamkan masyarakat Indonesia sebagai orientasi dan pemandu politik hukum, termsuk penggalian nilai- nilai dasar tujuan Negara dalam pembangunan hukum nasional.
5. Perumusan sistem hukum nasional sebagai jalan mewujudkan tujuan nasional dengan berbagai faktor yang memengaruhinya.
6. Melakukan penyusunan dan menuangkan kerangka pikir dalam merumuskan kebijakan hukum.
7. Substansi dari hukum nasional dengan berbagai faktor yang memengaruhinya.[[23]](#footnote-23)

Politik hukum, menurut Mahfud MD, merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum, diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Politik hukum berfungsi sebagai pedoman atau kebijakan hukum yang dirancang oleh lembaga negara untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini mencakup analisis kesesuaian hukum dengan kerangka *legal policy*, serta penggalian nilai-nilai dasar dan orientasi tujuan negara untuk pembangunan hukum nasional. Dalam praktiknya, politik hukum mencakup perumusan sistem hukum nasional, penyusunan kebijakan hukum, dan penentuan substansi hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, guna mewujudkan tujuan negara yang diidamkan masyarakat Indonesia.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperative* atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam, perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakan nya. Politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh) secara ekstrem dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh) dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif. Dinamika pengaruh konfigurasi politik yang demokratis dan/atau otoriter telah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia.[[24]](#footnote-24)

## Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

### Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum. Yang mana pemilu adalah suatu proses demokratisasi yang digunakan dalam banyak negara di seluruh dunia untuk memilih para pemimpin pemerintahan dan mewakili warga negara dalam suatu lembaga-lembaga di pemerintah. Bagi sebuah negara demokrasi seperti contohnya Indonesia, pemilu menjadi satu di antara unsur-unsur penting, dimana dalam sejarah nya Indonesia telah melaksanakan dua belas kali pemilihan umum.[[25]](#footnote-25) Pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin negara. Terdapat keyakinan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman karena didasarkan pada kehendak rakyat, sehingga sehingga sering dinyatakan bahwa pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum adalah penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi suatu rezim, sebagai pengakuan dan dukungan atas sahnya suatu kekuasaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat akan disampaikan, dan rakyat pemilih akan menilai para kontestan pemilu yang menawarkan visi, misi, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Sedemikian pentingnya pelaksanaan pemilu sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang telah disepakati bersama, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta harus diselenggarakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.[[26]](#footnote-26)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan sistem demokrasi, di mana rakyat dapat turut berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Suryanto mendeskripsikan pemilihan umum sebagai usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tanpa paksaan) melalui kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobi-lobi, maupun kegiatan-kegiatan lain.Sistem pemilihan umum merupakan sebagian di antara instrumen kelembagaan penting dalam negara demokrasi. Sebuah negara demokrasi ditandai dengan tiga syarat, sebagai berikut:

1. Kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.
2. Partisipasi masyarakat.
3. Jaminan hak-hak sipil dan politik.[[27]](#footnote-27)

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diwujudkanlah sistem pemilihan umum. Dengan sistem tersebut maka kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik dapat terpenuhi.

Pemilu dianggap penting dalam proses dinamiika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemilihan Umum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara demokrasi, hampir seluruh negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum termasuk Indonesia.[[28]](#footnote-28) Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Umum ialah bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Bebas ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Rahasia ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan dengan memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Adil maksudnya dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan yang dilakukan pihak manapun.[[29]](#footnote-29)

### Ruang Lingkup Pemilihan Umum

Pada awalnya, kedua bentuk Pemilihan Umum tersebut di atas (Pilpres dan Pileg) dilaksanakan secara terpisah, karena memiliki karakteristik yang berbeda. Namun sejak Pemilu 2019, kedua bentuk Pemilihan Umum tersebut digabungkan. Penggabungan kedua bentuk Pemilihan Umum dan dilaksanakan secara serentak pada waktu yang bersamaan selanjutnya disebut dengan Pemilu Serentak. Yaitu Pemilihan Umum yang memilih Presiden dan Wakil Presiden (sebagai pemimpin eksekutif) dan sekaligus memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) pada satu waktu yang sama.Pemilihan umum serentak yang sekarang dilaksanakan di Indonesia merupakan sebuah langkah besar dalam kehidupan demokrasi. Merujuk pengertian Pemilihan Umum tersebut di atas, diketahui bahwa ruang lingkup Pemilihan Umum adalah Pemilihan untuk memilihPresiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif. Namun dalam perkembangannya, bentuk pemilihan ini bukan hanya berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif saja, melainkan juga pemilihan terhadap kepala daerah. Bentuk pemilihan kepala daerah meliputi Pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Awalnya pemilihan kepala daerah dilakukan secara sendiri-sendiri sesuai dengan batas masa kepemimpinan kepala daerah yang bersangkutan.[[30]](#footnote-30)

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaraan (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*).[[31]](#footnote-31) Mengingat variabel-variabel di dalam sistem pemilu yang ada itu cukup beragam, implikasi dari penggunaan sistem pemilu juga berbeda-beda. Secara teoritis, perbedaan itu khususnya berkaitan dengan derajat keterwakilan politik dari para wakil yang terpilih melalui pemilu, dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan yang terbangun melalui pemilu. Karena itu, sejak lama, baik dikalangan akademis maupun praktisi, perbedaan tentang sistem pemilu mana yang terbaik dan sesuai untuk negara tertentu selalu dilakukan.[[32]](#footnote-32)

Pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginpemerintah lakukan. Dan dalam membuat keputusan ini, warga memutuskan dengan tepat apa yang ingin mereka dapatkan. Menurut A. Sudiharto, pemungutan suara merupakan bentuk esensial dari demokrasi dan bentuk partisipasi publik dalam masyarakat, bebas dalam arti tidak ada pengaruh atau tekanan dari partai. Semakin besar kebebasan dalam fungsi seleksi, semakin baik fungsi seleksi. Sebaliknya, semakin sedikit kebebasan, semakin buruk pilihannya. Dengan demikian, ada anggapan bahwa semakin banyak orang berpartisipasi dalam pemilu, semakin tinggi tingkat demokrasi.[[33]](#footnote-33)

### Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur oleh tiga lembaga utama yang berperan dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ketiga lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil seperti berikut :[[34]](#footnote-34)

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu di Indonesia. Tugas utama KPU meliputi perencanaan dan pelaksanaan semua tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon legislatif, hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilu. KPU juga bertanggung jawab untuk memastikan logistik pemilu, seperti surat suara dan kotak suara, tersedia dan terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU membentuk badan ad hoc di tingkat daerah untuk membantu pelaksanaan pemilu di tingkat lokal. Jumlah anggota KPU pusat adalah tujuh orang yang dipilih melalui proses seleksi dan diangkat oleh Presiden.

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi utama Bawaslu meliputi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu lainnya. Struktur Bawaslu terdiri dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan, dengan jumlah anggota Bawaslu RI sebanyak lima orang.

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu anggota KPU dan Bawaslu. DKPP berwenang memeriksa dan memutus aduan atau laporan mengenai pelanggaran kode etik, serta menjatuhkan sanksi berupa peringatan hingga pemberhentian tetap terhadap anggota yang terbukti melanggar. DKPP terdiri dari tujuh anggota yang berasal dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas dan reputasi yang baik.

Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki peran yang jelas, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu isu terkini adalah pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Contohnya, Ketua KPU Kabupaten Brebes, Manja Lestari Damanik, dan Ketua Bawaslu Brebes, Trio Pahlevi, diberhentikan oleh DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran terkait penggelembungan suara dan dugaan politik uang.

## Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Publik

### Pengertian Partisipasi Publik

Peran serta masyarakat atau yang juga dikenal dengan istilah partisipasi publik adalah elemen penting dari pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sah secara demokratis. Peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk saluran yang diberikan kepada masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Saat ini, pengakuan terhadap proses peran serta masyarakat dapat dilihat pada setiap level kebijakan, baik secara internasional, regional, nasional dan lokal.[[35]](#footnote-35) Partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik menurut Smith dan Ingram juga akan memberi manfaat bagi pemerintah. Sebab pemerintah akan menjadi lebih kuat dalam arti ada peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pembuatan kebijakan yang akan berimplikasi pada peningkatan dukungan publik terhadap pemerintah, misalnya pemberian suara pemilihan umum. Ilmuan politik lainnya, Sample, Webler, Kastenho,Z, dan Renn yang dikutip oleh Glicken mengatakan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan, yakni memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pem-buat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, mem-berikan legitimasi yang lebih besar terhadap keputusan-keputusan yang dibuat karena partisipasi publik dapat meningkatkan akun-tabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan citra positif sebagai suatu masyarakat demokratis.[[36]](#footnote-36)

Perlunya partisipasi publik di dalam pembentukan kebijakan publik adalah dalam rangka mengimbangi adanya kehendak yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan menjurus kepada kepentingan-kepentingan para pihak yang mengambil keputusan, seperti dinyatakan oleh James E Andersen bahwa ada beberapa macam nilai yang melandasi tingkah laku pembuat keputusan dalam membuat keputusan, yaitu :

1. Nilai-nilai politis (*political values*)

keputusan-keputusan yang dibuat didasarkan atas kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.

1. Nilai-nilai organisasi (*organization values*)

keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*) dan sanksi (*sanctions*) yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya.

1. Nilai-nilai pribadi (*personal values*)

seringkali pula keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status-quo, reputasi, kekayaan dan sebagainya.

1. Nilai-nilai kebijaksanaan (*policy values*)

keputusan dibuat atas dasar persepsi membuat kebijaksanaan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijaksanaan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.

1. Nilia-nilai ideologi atau (*ideological values*)

nilai ideologi seperti nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti kebijaksanaan dalam dan luar negeri.[[37]](#footnote-37)

Partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan segelintir pihak, tetapi juga berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Seperti yang dinyatakan oleh James E. Andersen, berbagai nilai seperti nilai politis, organisasi, pribadi, kebijaksanaan, dan ideologi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengimbangi berbagai kepentingan tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta sesuai dengan kebutuhan publik.

Secara definisi, keberadaan partisipasi masyarakat memang tak sebatas dipandang sebagai adanya prosedur formil yang menjadi saluran aspirasi masyarakat. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut *United States Environmental Protection Agency* menjelaskan partisipasi publik dapat berupa setiap proses yang secara langsung melibatkan publik dalam pengambilan keputusan dan memberikan pertimbangan penuh terhadap masukan publik dalam pengambilan keputusan tersebut.[[38]](#footnote-38) Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang tak disertai partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, demokrasi niscaya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negaranya. Untuk itu, sebuah pemerintahan yang baik perlu berupaya meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihakpihak yang paling terimbas kebijakan publik. Oleh sebab itu, sebagai salah satu prinsip *good governance* dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam wujud pengambilan kebijakan publik harus terjamin konstitusi atau peraturan perundang-undangan Jaminan ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa publik memiliki peluang untuk terlibat baik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan sebuah kebijakan publik.[[39]](#footnote-39)

### Ruang Lingkup Partisipasi Publik

Partisipasi publik untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sebagai salah satu ciri *good governance* mencakup interaksi antara elemen pemerintah, sektor swasta, dan *civil society* dengan mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin supremasi hukum, menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan dari seluruh kalangan termasuk yang paling lemah dan miskin dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Penetapan suatu kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, guna mengatasi permasalahan, kegiatan atau mencapai tujuan tertentu serta kemanfaatan yang ujung pangkalnya bagi kepentingan publik. Sehingga, implikasi demokrasi partisipatif dan kepemerintahan yang baik pada proses pembentukan kebijakan didapatkan pemahaman, bahwa prinsip pemerintahan berdasarkan hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang diwujudkan dalam proses pembentukan kebijakan.[[40]](#footnote-40)

Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dilakukan denganproses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang- undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.[[41]](#footnote-41) Disamping itu, partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi memiliki peran untuk menjaga nilai demokrasi itu sendiri, seperti:

1. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
2. Menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah.
3. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan public.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat.[[42]](#footnote-42)

Partisipasi publik merupakan elemen vital dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, karena dengan keterlibatan aktif warga, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, aspirasi masyarakat tersalurkan, keputusan publik menjadi lebih inklusif, dan kedaulatan rakyat tetap tegak. Dengan demikian, demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika masyarakat secara konsisten mengambil peran aktif dalam berbagai proses yang menentukan arah kebijakan dan pembangunan negara.

Pada dasarnya Partisipasi publik adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapatturut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas serta terbuka. Ia merupakan perwujudan dari sistem yang secara ideal mensyaratkan kedaulatan berada ditangan rakyat.[[43]](#footnote-43) Transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada Undang-Undang akan menjadi prasyarat bagi partisipasi publik akan peran dan tanggung jawabanya dalam penentuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di daerah dapat segera diwujudkan.[[44]](#footnote-44)

## Tinjauan Umum Tentang Era Digital

### Pengertian Era Digital

Era digital ialah masa di mana sebagian besar individu pada masa itu menjalani kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknologi digital. Di era ini, lahirlah sebuah generasi yang disebut dengan generasi digital natives. Generasi yang dikenal sebagai digital natives adalah generasi yang tumbuh dengan komputer dan memandang teknologi sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka.[[45]](#footnote-45) Era Digital merupakan masa dimana informasi dengan sangat mudah dapat diakses dan disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital, dimasa ini kemudahan dalam mengakses segala informasi hampir tanpa ada batasan.[[46]](#footnote-46) Perkembangan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai pesatnya perkembangan teknologi digital, menjadikan masa depan akan mengalami perubahan-perubahan besar. Beberapa perubahan tersebut akan terjadi di berbagai aspek kehidupan, di antaranya sektor industri, pemerintahan, pendidikan.[[47]](#footnote-47)

Pada era ini merupakan keadaan, kondisi, masa , dimana situasi kehidupan dapat menjadi serba mudah karena adanya teknologi. Berdasarkan pernyataan ini, dapat kita fahami bahwa kemajuan teknologi yang begitu pesat membawa dampak positif yang nyata dan terasa bagi manusia. Teknologi yang berkembang secara cepat dapat menggantikan teknologi yang usang di masa lalu, hal ini dikarenakan tuntutan zaman di abad 21 begitu kompleks sehingga manusia berpikir untuk terus mlakukan berbagi inovasi terbaik dalam membuat teknologi. Dimana semua teknologi yang terbaru dan modern dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah segala aktivitasnya. Ini merupakan masa dimana sebagian besar masyarakat menggunakan berbagai teknologi secara digital untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya. Kecanggihan teknologi dipandang sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, dikarenakan kemajuan teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seahri-hari dan dapat menunjang segala aktivitas yang yang dilakukan. Berdasarkan pengertian era digital maka disimpulkan bahwa era digital merupakan suatu kondisi atau masa dimana teknologi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya.[[48]](#footnote-48) Perkembangan era digital terus berjalan cepat dan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Karena sebenarnya kita sendirilah yang menuntut dan meminta berbagai hal menjadi lebih efisien dan lebih praktis. Tentunya hal ini juga akan diiringi dengan dampak negatif maupun positif.

### Ruang Lingkup Era Digital

Ada peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh manusia dalam era digitalsaat ini. Peluang yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal positif yang diperoleh manusia dari kehadiran era digital ini. Beberapa hal yang dapat disebutkan di sini. Pertama, tentang bagaimana informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah diakses. Kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasipada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan. Ketiga, munculnya media massa berbasis digital sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kelima, munculnya berbagai sumber pembelajaran,seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, serta forum diskusi onlineyang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Keenam, munculnya *e-business*, seperti toko *online* yang menyediakan berbagai barang kebutuhan yang mudah untuk didapatkan.[[49]](#footnote-49)

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup transformasi digital tidak hanya sebatas peralihan teknologi saja, melainkan transformasi digital juga mencakup perubahan budaya organisasi, di mana organisasi harus mengadopsi pola pikir yang lebih terbuka terhadap perubahan, berkolaborasi secara lebih efektif, dan mendorong kreativitas serta eksperimen untuk menciptakan nilai tambah baru bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini transformasi digital semakin masif dan mudah dilakukan, karena pelaksanaannya dapat menggunakan berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan.[[50]](#footnote-50)

Karena perubahan budaya dalam cara penyebaran informasi, media massa kini menggunakan media baru atau internet. Kapasitas media era digital memudahkan masyarakat untuk belajar lebih cepat. Media arus utama berbondong-bondong untuk mengubah arah sebagai akibat dari media digital. Era digital merupakan era dimana teknologi lebih unggul dibandingkan bidang lainnya. Pada era digital masyarakat lebih sering menggunakan atau memanfaatkan media digital sebagai penunjang aktivitas kehidupan sehari-harinya.[[51]](#footnote-51) Teknologi digital di era disrupsi harus diposisikan dalam rangka pengembangan aktifitas positif warga negara. Hasil teknologi digital seperti smartphone, laptop, televisi pintar, tablet, dsb dapat membantu setiap warga negara di bidang pendidikan, komunikasi, periklanan, pengarsipan maupun hiburan. Namun sebaliknya, teknologi digital bisa disalahgunakan seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, ataupun modus penipuan, dsb. Perilaku negatif paling rentan dilakukan oleh generasi muda yang berada dalam proses pencarian jati diri dari fase transisi remaja menuju dewasa karena tidak mampu memfilter kemajuan dari teknologi digital.[[52]](#footnote-52)

Revolusi digital dapat dianggap sebagai bagian dari globalisasi, yaitu integrasi internasional yang terjadi berkat pertukaran pandangan, pemikiran, produk, dan aspek budaya lainnya, yang didorong oleh perkembangan infrastruktur telekomunikasi, internet, dan transportasi. Manfaat dari era digital meliputi:

1. Kemudahan dalam Berkomunikasi

Di era digital saat ini, komunikasi menjadi lebih mudah. Orang-orang dikelilingi oleh perangkat digital canggih, seperti smartphone, yang memungkinkan mereka untuk tetap terhubung melalui teknologi internet. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi digital yang paling mudah dirasakan.

1. Mobilitas dan Fleksibilitas

Era digital memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan dengan lebih mudah tanpa batasan lokasi. Hal ini tampak, misalnya, pada kemudahan mengikuti acara atau kegiatan tertentu tanpa perlu hadir secara langsung. Contohnya, proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi kini dapat dilakukan dari mana saja tanpa perlu hadir di kampus.

1. Dominasi Internet atas Pulsa Tradisional

Di masa digital ini, penggunaan internet menjadi sangat dominan, khususnya bagi generasi milenial. Internet memainkan peran penting, sehingga orang lebih memilih kehabisan pulsa daripada paket data. Paket data tidak hanya digunakan untuk menjelajahi internet tetapi juga sebagai media komunikasi yang lebih hemat biaya dibandingkan pulsa.

1. Kemudahan Berbelanja dan Akses Kebutuhan Lainnya

Dengan kehadiran internet, berbagai e-commerce dan toko online berkembang, sehingga masyarakat dapat berbelanja atau mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mendatangi toko fisik. Manfaat dari toko online ini adalah memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi meskipun berada di lokasi yang jauh terpisah.[[53]](#footnote-53)

Secara keseluruhan, revolusi digital telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi yang lebih mudah, mobilitas yang lebih fleksibel, hingga dominasi internet yang menggeser pola penggunaan pulsa tradisional. Selain itu, kemajuan teknologi ini juga mempermudah akses terhadap berbagai kebutuhan melalui platform e-commerce. Dengan segala kemudahannya, era digital tidak hanya mendorong efisiensi dalam aktivitas sehari-hari tetapi juga mempercepat integrasi global di berbagai bidang. Namun, penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi ini secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa mengabaikan tantangan yang mungkin muncul.

1. Efriza, Jerry Indrawan, *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2019:1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Asep Deni, *et.al*, *Pengantar Politik*, Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024:4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Rosandi, *et.al*, *Politik Hukum Indonesia*, Padang: Gita Lentera, 2023:1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Eka Nam Sihombing, *Politik Hukum*, Medan: Enam Media, 2020:1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sri Herlina, “Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum 2024”, *Jurnal Sultan Adam*, 2 (1), 2024:138. https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/761/645. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mega Sulistiowati,” Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan)” *Skiripsi Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara,* *Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan,* 2021http://etheses.uingusdur.ac.id/8243/1/1517027%20-%20Bab1%265.pdf. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kamal, “Implementasi Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017” *Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal*, 2022. https://repository.upstegal.ac.id/5226/. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cut Raina Lidia, “Literasi Politik Di Era Digital Dalam Memahami Isu-Isu Politik Bagi Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Kota Lhokseumawe)” *Skripsi Fisip, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe*, 2024. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2866/. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022:37. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibnu Maulana Zahida, Arum Ayu Lestari, Sindi Dwi Yunike, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 2020: 24. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/. [↑](#footnote-ref-10)
11. Iman Jalaludin Rifa’i, *et.al*, *Metodologi Penelitian Hukum*, Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023:17. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hasna Latifatunnisa, “Metode Pengumpulan Data: Jenis dan Langkah-langkah”, Diakses melalui https://revou.co/panduan-teknis/metode-pengumpulan-data.pada 14 Oktober 2024, Pukul 23:29 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Patrisius Istiarto Djiwandono, Wawan Eko Yulianto, *Penelitian Kualitatif Itu Mengasyikan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023:2. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* hlm. 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politik hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013:19 [↑](#footnote-ref-15)
16. Frenki, “Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 2023:2. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1662. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rosadi, O, *Studi Politik Hukum:Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012: 3 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Rosandi Sakir*, et.al*, Politik Hukum Indonesia, Padang: Gita Lentera, 2023:8. [↑](#footnote-ref-18)
19. Erika Vivin Setyoningsih, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Penegakanhukumdan Keadilan*, 2(2), 2021:122. https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/11749/6892. [↑](#footnote-ref-19)
20. Any Ismayawati, “Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia “, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 2021:114. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/97353911/pdf-libre.pdf?1673859958=&. [↑](#footnote-ref-20)
21. Derita Prapti Rahayu, Faisal, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”, *Pandecta,* 16(1), 2021:169. https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/28013/11897. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wahyudin Darmalaksana, *Filsafat & Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*, Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022:42. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP”, *Khazanah Multi Disiplin*, 2(1), 2021:48-49. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/11636. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, Bestari Laia, “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektifpolitik Hukum”, *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 2023:69-70. https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/1006/873. [↑](#footnote-ref-24)
25. Rio Vandamme, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia*”, Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 2024:74. http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/albahts/article/view/3130/1611. [↑](#footnote-ref-25)
26. Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar, “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum”, *Jurnal Retentum*, 2(1), 2021:91. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/906/764. [↑](#footnote-ref-26)
27. Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2018:256. [↑](#footnote-ref-27)
28. Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia“, *Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(1), 2021:34. https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/4235/13247. [↑](#footnote-ref-28)
29. Athiyyatul Mufidah, Abdullah Syarofi, “Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umumdi Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)”, *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 2024:47. http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HTN/article/view/868/663. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nurlaili Rahmawati, Sigit Nurhadi Nugraha, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan”, *Ja: Jurnal Al-Wasath*, 4(1), 2023:58. https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/661/394. [↑](#footnote-ref-30)
31. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasdi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2012:91. [↑](#footnote-ref-31)
32. Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011:266. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mhd. Taufiqurrahman, Bakhrul Khair Amal, “Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat”, *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 2022:405. https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1751/1577, [↑](#footnote-ref-33)
34. Fatna Anisa, “Yuk, Mengenal 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia!”, diakses melalui https://www.medcom.id/nasional/politik/ybDrYJ0K-yuk-mengenal-3-lembaga-penyelenggara-pemilu-di-indonesia/ pada 14 Januari 2025, pukul 21:23 WIB. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ayu Citra Santyaningtyas, Warah Atikah, “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2023:4. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2095/1534. [↑](#footnote-ref-35)
36. Thomas Bustomi, Andre Ariesmansyah, Asep Kusdiman, “Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governancepada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung”, *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 2022:49. https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/5037/2172. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sofwan, “Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jatiswara*, 37(1), 2022:124. https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/364/267. [↑](#footnote-ref-37)
38. M Nurul Fajri, “Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 2023:124. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/jk2017/17. [↑](#footnote-ref-38)
39. Sarah Malena Andrea Dondokambey, Dani R. Pinasang, Toar N. Palilingan, “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Lex Privatum*, 11(2), 2023:2. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626. [↑](#footnote-ref-39)
40. Bagus Hermanto, “Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris”, *Jurnal Yudisial*, 16(2), 2023:213-214. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/668/426. [↑](#footnote-ref-40)
41. Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 2023:312. https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/337/261. [↑](#footnote-ref-41)
42. Laurensius Arliman, “Pertisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), Agustus 2017:66. http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/379. [↑](#footnote-ref-42)
43. Rini Maisari, “Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Papua”, *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 2022:64. https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/1854/1109. [↑](#footnote-ref-43)
44. Belinda Maria Sigarlaki, Roosie Lasut, Roy Ronny Lembong, “Analisis Terhadap Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dalam Pengambilalihan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Lex Privatum*, 11(2), 2023:2-3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46821. [↑](#footnote-ref-44)
45. Hendrik Legi, Antonius Wamo, “Merdeka Mengajar Di Era Digital”, *Pedagog*, 1(1), 2023:17. https://jurnal.stkipkw.ac.id/index.php/pji/article/view/50. [↑](#footnote-ref-45)
46. Darwanto D, Mar'atun Khasanah, Anggi Monica Putri, “Penguatan Literasi, Numerasi, Dan Adaptasi Teknologi Pada Pembelajaran Di Sekolah”, *Eksponen,* 11(2), 2021:26. https://jurnal.umko.ac.id/index.php/eksponen/article/view/381. [↑](#footnote-ref-46)
47. I Made Mahadi Dwipradnyana, I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani Pratiwi, I Gusti Nengah Darma Diatmika, “Strategi Pengembangan Koperasi Di Era Digital Pada Koperasi Yang Ada Di Provinsi Bali”, *Majalah Ilmiah Untab*, 17(2), 2020:112. https://ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/87/84. [↑](#footnote-ref-47)
48. Cucu Suryana, Tatang Muhtar, “Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara di Sekolah Dasar pada Era Digital”, *Jurnal Basicedu*, 6(4), 2022:6120. https://media.neliti.com/media/publications/451908-none-62c47ca8.pdf. [↑](#footnote-ref-48)
49. Wiwin, Antonius Denny Firmanto, “Konstruksi Model Spiritualitas Pastoral bagi Katekis di Era Digital”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 1(1), 2021;130. https://jurnalppak.or.id/ojs/index.php/jppak/article/view/31/8. [↑](#footnote-ref-49)
50. Redaksi Siberkreasi, “Apa Itu Transformasi Digital? Ruang Lingkup dan Jenis-Jenisnya”, *Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital*, Diakses melalui https://gnld.siberkreasi.id/apa-itu-transformasi-digital-ruang-lingkup-dan-jenis-jenisnya/, Pada 27 Desember 2024, Pukul 19:08 WIB. [↑](#footnote-ref-50)
51. Yolanda Shafitri, Aliaputri Dharmayanti, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Peredarannya Di Era Digital”, *Jurnal Bela Negara*, 1(2), 2023:4. https://ejournal.upnvj.ac.id/jbn/article/view/5208. [↑](#footnote-ref-51)
52. Misrina, Wahyudin Noe, “Membumikan Pancasila Di Era Disrupsi Earthing Pancasila In The Era Of Disruption”, *Jurnal Gembira*, 2(6), 3034:2216. https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/786/569#google\_vignette. [↑](#footnote-ref-52)
53. M Rakha, “Apa Itu Era Digital? Ini Pengertian dan Manfaatnya!”, Humic Research Center, Diakses melalui https://humic.telkomuniversity.ac.id/id/apa-itu-era-digital-ini-pengertian-dan-manfaatnya/, Pada 27 Desember 2024, Pukul 20:25 WIB. [↑](#footnote-ref-53)